PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 100.3.3.2/357/KESBANGPOL

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menyusun Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Wonosobo;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 491/124/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana memiliki tugas antara lain mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data menjadi bahan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Daftar Informasi Dan Dokumentasi Publik Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Wonosobo Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 741);
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 No 3);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 82)
17. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 480/154/ 2022 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022;
18. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Wonosobo Nomor : 489/200/ 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Wonosobo Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan serta merta dan Informasi wajib tersedia setiap saat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 23 April 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN WONOSOBO,



Drs. AGUS KRISTIONO, M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Nomor : 100.3.3.2/357/KESBANGPOL
Tanggal : 23 April 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

I. INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO.	JENIS INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PENERBITAN	BENTUK INFORMASI	RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	PROFIL						
1	Kedudukan dan Domisili beserta alamat lengkap	Jln. Soekarno Hatta Nomor 1 Telp (0286) 324215 Email: kesbangpol65@gmail.com	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 Tahun
2	Visi Dan Misi Kabupaten Wonosobo	Visi : TERWUJUDNYA WONOSOBO YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN SEJAHTERA ; Misi : Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat; Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi ;	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	2026	Salinan Digital	3 tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	JENIS INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PENERBITAN	BENTUK INFORMASI	RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
		Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul religius/berkarakter, berbudaya, kreatif, inonatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern; Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata; Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang;					
3	Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah	Memuat informasi berkaitan Struktur Organisasi, tugas dan fungsi serta Profil Pimpinan Perangkat Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 Tahun
4	Profil Pimpinan Pemerintah Kabupaten Wonosobo	Mengurai Profil Pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	JENIS INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PENERBITAN	BENTUK INFORMASI	RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN)	Menyajikan hasil pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	1 Tahun
B	RINGKASAN PROGRAM DAN KEGIATAN						
1	Daftar Program, Kegiatan dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Mengurai Daftar Program, Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 tahun
2	Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan atau alamat yang dapat dihubungi	Memuat para penanggung jawab dan pelaksana program dan kegiatan utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 tahun
3	Target dan/atau capaian program dan kegiatan	Memuat target dan capaian program dan kegiatan utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	JENIS INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PENERBITAN	BENTUK INFORMASI	RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Jadwal Pelaksanaan program dan kegiatan	Memuat jadwal pelaksanaan program dan kegiatan utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 tahun
5	Informasi Khusus lain yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat	Menyajikan jenis-jenis pelayanan yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 tahun
C	LAPORAN KINERJA BADAN PUBLIK						
1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2026	Informasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 tahun
D							
1	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2026	Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2026 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	JENIS INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PENERBITAN	BENTUK INFORMASI	RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2026	Informasi Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 tahun
3	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Tahun 2026	Informasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 tahun
4	Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026	Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah disahkan oleh Institusi Pengawas Tahun 2026	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 tahun
5	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2026	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran yang sudah diaudit Tahun 2026	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 tahun
6	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2026	Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2026	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	JENIS INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PENERBITAN	BENTUK INFORMASI	RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Neraca Tahun 2026	Neraca Tahun 2026	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 tahun
8	Data Aset dan Inventaris Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2026	Informasi tentang Data Aset dan Inventaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 tahun
E	LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK						
1	Laporan Ringkasan Informasi Publik Tahun 2026	Laporan yang memuat: 1) Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima; 2) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik; 3) Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan yang ditolak; dan 4) Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik (Laporan Tahunan PPID Th. 2026)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 tahun
F	PERATURAN BADAN PUBLIK						
1	Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan Dan Kebijakan Yang Disahkan	Informasi Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan dan Kebijakan yang Disahkan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 tahun
G	TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	JENIS INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PENERBITAN	BENTUK INFORMASI	RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prosedur Layanan Informasi Publik	Informasi Prosedur Pelayanan Informasi Publik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 tahun
2	Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi Publik	Informasi Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi Publik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 tahun
H	TATA CARA PENGADUAN MASYARAKAT						
1	Tata Cara Pengaduan Masyarakat Tentang Kegiatan Pelayanan Publik	Informasi tata cara pengaduan dan atau pelaporan terkait pelanggaran kewenangan tentang kegiatan pelayanan publik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 tahun
I	PENGADAAN BARANG DAN JASA						
1	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025	Informasi seputar Pengadaan Barang dan Jasa di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 tahun
J	PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT						
1	Prosedur Peringatan Dini Dan Evakuasi Darurat Terhadap Bencana	Informasi Prosedur Peringatan Dini Dan Evakuasi Darurat Terhadap Bencana atau Keadaan Darurat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	JENIS INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PENERBITAN	BENTUK INFORMASI	RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8

II. INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

INFORMASI BENCANA ALAM, BENCANA NON ALAM DAN BENCANA SOSIAL							
1	Informasi Kejadian Bencana Alam, Bencana Non Alam dan Bencana Sosial	Informasi Kejadian Bencana Alam, Bencana Non Alam dan Bencana Sosial	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 tahun
2	Daftar Kejadian Bencana	Daftar Kejadian Bencana di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 tahun
3	Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik	Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 tahun

III. INFORMASI WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

A	DAFTAR INFORMASI PUBLIK						
1	Daftar Informasi Publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2026	Berisi tentang Informasi - informasi publik yang tersedia secara berkala, serta merta, setiap saat Tahun 2026	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 tahun
B	INFORMASI TENTANG PERATURAN, KEPUTUSAN DAN/ATAU KEBIJAKAN BADAN PUBLIK						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	JENIS INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PENERBITAN	BENTUK INFORMASI	RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dokumen pendukung dari Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang ditetapkan	Dokumen yang berisi: 1.naskah akademis/kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, 2.masukan dari berbagai pihak, 3.risalah rapat, rancangan peraturan, dan 4.tahap perumusan peraturan. 5. Peraturan keputusan, dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 tahun
C	INFORMASI TENTANG ORGANISASI, ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN						
1	Informasi mengenai Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan;	Informasi Mengenai: 1. pedoman pengelolaan organisasi, 2. pedoman pengelolaan administrasi, 3. pedoman personil, dan 4. pedoman keuangan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 tahun
2	Informasi mengenai Profil lengkap pimpinan dan pegawai;	Informasi memuat: 1.nama, 2.sejarah karir atau posisi, 3.sejarah pendidikan, 4.penghargaan.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	JENIS INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PENERBITAN	BENTUK INFORMASI	RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Informasi mengenai Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya;	Informasi mengenai: 1.dokumen anggaran secara umum, dan 2. dokumen laporan keuangan yang telah diaudit.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 tahun
4	Informasi mengenai Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik	Dokumen data statistik mengenai: 1. organisasi, 2. administrasi, 3. kepegawaian, dan 4. keuangan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 tahun
D	PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA						
1	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Informasi Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga yang masih berlaku.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 tahun
E	DOKUMEN SURAT MENYURAT PIMPINAN/PEJABAT						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	JENIS INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PENERBITAN	BENTUK INFORMASI	RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dokumen Surat Menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya	Tentang dokumen surat menyurat pimpinan/Pejabat di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 tahun
F	PERIZINAN						
1	Informasi tentang Perizinan	Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 tahun
G	RENCANA STRATEGIS						
1	Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 - 2026	Informasi Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 tahun
2	Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026	Informasi Rencana Kerja Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	JENIS INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PENERBITAN	BENTUK INFORMASI	RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Perjanjian Kinerja	Informasi Rencana Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	1 tahun
H	AGENDA KERJA PIMPINAN						
1	Agenda Kerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Agenda kegiatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	1 tahun
I	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK						
1	Sumber Daya Manusia Yang Menangani, Sarana Prasarana dan Anggaran Layanan Informasi Publik	Informasi tentang Sumber Daya Manusia Yang Menangani, Sarana Prasarana dan Anggaran Layanan Informasi Publik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	3 tahun
2	Laporan Layanan Informasi Publik	Laporan Layanan Informasi Publik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	1 tahun
J	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM BERITA						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	JENIS INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PENERBITAN	BENTUK INFORMASI	RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Berita Online Wonosobo	Informasi dan berita seputar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	1 tahun
2	Kliping Koran Wonosobo	Arsip berita Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	1 tahun
K	PENGUMUMAN						
1	Pengumuman Seputar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Informasi seputar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	1 tahun
2	Surat Edaran	Informasi seputar surat edaran yang dikeluarkan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	1 tahun
L	PENANGANAN PENGADUAN						
1	Informasi Pengaduan oleh masyarakat dan penanganannya	Informasi Pengaduan oleh masyarakat dan penanganannya	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	1 tahun
M	PENELITIAN						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	JENIS INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PENERBITAN	BENTUK INFORMASI	RETENSI ARSIP
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hasil Penelitian terkait Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Informasi mengenai Hasil Penelitian terkait Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	2026	Salinan Digital	1 tahun

Ditetapkan di Wonosobo
pada 23 April 2026
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Drs. AGUS KRISTIONO, M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).